

Identifikasi Perubahan Pemukiman Suku Bajo Di Desa Lemito, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo

Febrianti*¹, Daud Yusuf ¹, Wiwin Kobi¹

¹Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Negeri Gorontalo
*e-mail: febriantihawang@gmail.com

Abstract

Identification of Changes in Bajo Tribe Settlements in Lemito Village, Pohuwato Regency, Gorontalo Province. This study aims to identify changes in the settlements of the Bajo tribe in Lemito Village, Pohuwato Regency, as well as to identify the social, economic, and environmental factors that influence these transformations. The research methods used include spatial analysis of satellite imagery from 2011 to 2025 combined with surveys and field interviews. The results show that the settlement area has increased significantly from 1.85 hectares in 2011 to 3.65 hectares in 2025. Population growth, which reached 1,099 people, also triggered an increase in residential density and the conversion of mangrove land into built-up areas. Socioeconomically, 75% of the community has switched their livelihoods to the land sector, while 62.5% of respondents assessed that the Bajo tribe's culture has begun to experience a decline in traditional values. These findings indicate that the changes in the Bajo tribe's settlements are a form of community adaptation to the tide of modernization and coastal development.

Keywords: *The Bajo Tribe; Changes in Settlement Patterns; Social Conditions; Economic Conditions.*

Abstrak

Identifikasi Perubahan Pemukiman Suku Bajo Di Desa Lemito, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan permukiman masyarakat Suku Bajo di Desa Lemito, Kabupaten Pohuwato, serta mengidentifikasi faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi transformasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan meliputi analisis spasial terhadap citra satelit tahun 2011–2025 yang dikombinasikan dengan pendekatan survei dan wawancara lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas kawasan permukiman mengalami peningkatan signifikan dari 1,85 Ha pada tahun 2011 menjadi 3,65 Ha pada tahun 2025. Pertumbuhan jumlah penduduk yang mencapai 1.099 jiwa turut memicu peningkatan kepadatan hunian serta konversi lahan mangrove menjadi area terbangun. Secara sosial ekonomi, sebanyak 75% masyarakat telah beralih mata pencaharian ke sektor darat, sementara 62,5% responden menilai budaya Suku Bajo mulai mengalami penurunan nilai-nilai tradisional. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan permukiman Suku Bajo merupakan bentuk adaptasi masyarakat terhadap arus modernisasi dan perkembangan wilayah pesisir.

Kata kunci: *Suku Bajo; Perubahan Pola Permukiman; Kondisi Sosial; Kondisi Ekonomi.*

1. PENDAHULUAN

Permasalahan Pemukiman Suku Bajo di Gorontalo, khususnya di Desa Lemito bagian pantai lemito yang mencerminkan tantangan sosial yang memiliki perbedaan sifat kemasyarakatan dalam berpendapat serta perbedaan suku, kemudian tantangan ekonomi yang seringkali menjadi suatu alasan, kenapa banyak para warga yang masih, kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga, sehingga hal ini juga yang menjadi tantangan. Kemudian Budaya Suku Bajo ini juga menjadi suatu tantangan dalam mempertahankan budaya mereka yang masih dipertahankan, walaupun banyak yang tidak mempertahankan kebudayaan. Permukiman tradisional mereka sering kali teridentifikasi sebagai kawasan kumuh dengan kondisi hunian yang tidak teratur, kepadatan bangunan tinggi, dan minimnya fasilitas umum. Permukiman idealnya harus memuat dua syarat utama yaitu, fisik lingkungan harus mencerminkan pola kehidupan dan pola budaya setempat, dan lingkungan permukiman harus didukung oleh fasilitas pelayanan dan utilitas umumnya sebanding dengan ukuran atau luasnya lingkungan dan banyaknya penduduk (Rakhmawati *et al.*, 2014). Rumah-rumah terapung yang menjadi ciri khas suku Bajo dibangun berdekatan tanpa jarak memadai, sering kali dalam bentuk non-permanen, sehingga menciptakan kesan kumuh. Kekumuhan ini diperparah oleh degradasi lingkungan pesisir karena

hilangnya prinsip kearifan lokal yang dahulu menjaga ekosistem laut. Tradisi melaut suku Bajo yang mengutamakan kelestarian laut kini mulai memudar akibat modernisasi dan perubahan cara hidup masyarakat (Damisi et al., 2014)

Permasalahan lain adalah banyak warga suku bajo yang mulai berpindah seiring berjalannya waktu dari tempat tinggal di perairan dan beralih ke daratan. Poedjowibowo & Waani, (2016) menjelaskan bahwa transformasi pada permukiman Suku Bajo terjadi akibat adanya perubahan orientasi terhadap ruang hidup. Proses transformasi ini juga ditandai dengan perubahan spasial yang nyata, seperti munculnya pola permukiman berkelompok dan permanen di daerah pesisir, menggantikan pola menyebar yang sebelumnya mendominasi kehidupan di atas air. (Salipu & Mulyati, 2022). Hal ini yang menyebabkan ketidak teraturan pola pemukiman, faktor-faktor yang mempengaruhi hal ini seperti modernisasi terjadinya perubahan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern hal ini juga yang sangat berdampak bagi pola pemukiman, kemudian kebijakan pemerintah, Pemerintah daerah belum menerbitkan sertifikat tanah bagi masyarakat Suku Bajo karena kurangnya aturan atau peraturan daerah (PERDA) yang mendukung hak-hak mereka Andi et al., (2023). Perubahan ini terjadi karena adanya dorongan dari program pemerintah seperti transmigrasi lokal, kebutuhan pendidikan anak-anak Bajo, serta tekanan dari kebijakan konservasi laut yang membatasi ruang gerak mereka (Muhammad Obie, 2018)

Perubahan lingkungan juga menjadi faktor perubahan pola pemukiman, lingkungan lautan yang kotor menjadi ketidak nyamana dalam kehidupan suku bajo di bagian lemito pantai, pencemaran lingkungan sudah terjadi dan susah bagi warga membersihkan perairan karena banyak juga warga yang tidak menjaga, Perubahan pola pemukiman dan kehidupan juga menjadi tantangan besar Baharudin., (2011). Suku Bajo yang sebelumnya hidup berpindah-pindah kini harus beradaptasi dengan permukiman permanen di daratan atau hunian tetap di atas air. Perubahan ini sering kali tidak disertai dengan kemampuan membangun hunian yang sesuai dengan kondisi iklim tropis atau mempertahankan kenyamanan pengudaraan dan pencahayaan alami Mukramin, S. U., (2023). Permasalahan kepastian hukum terkait pemukiman Suku Bajo di Desa Torosiaje Laut masih menjadi isu yang belum terselesaikan. Sejak pertama kali menetap di atas perairan Teluk Tomini sekitar tahun 1901 di bawah kepemimpinan adat Si Aje (Pette Sompia), masyarakat Suku Bajo telah membangun hunian di atas laut tanpa memiliki sertifikat resmi. Awalnya, hanya terdapat empat rumah, namun seiring pertumbuhan populasi, jumlah rumah pun meningkat hingga mencapai ratusan, dengan jumlah penduduk sekitar 1.442 jiwa dan 149 kepala keluarga, (Yusuf, L., & Rahim, 2020).

Namun, sebagian besar masyarakat Suku Bajo memilih kembali ke hunian mereka di atas laut. Faktor utama yang mendorong mereka kembali adalah kesulitan memperoleh air bersih serta tantangan dalam beradaptasi dengan kehidupan di darat, mengingat mereka telah terbiasa hidup di lingkungan laut yang menjadi bagian dari identitas budaya dan mata pencaharian mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan resettlement belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat Suku Bajo, sehingga permasalahan pola pemukiman mereka masih belum terselesaikan hingga kini (Andi et al., 2023). Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengangkat judul “Identifikasi Perubahan Pemukiman Suku Bajo Di Desa Lemito, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo”

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan meliputi analisis spasial terhadap citra Google Earth dan citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Spot 7 tahun 2011, 2019, 2023 dan 2025 yang dikombinasikan dengan pendekatan survei dan wawancara lapangan. Dengan menganalisis data-data spasial citra satelit temporal perubahan-perubahan pola pemukiman suku Bajo dapat diidentifikasi dengan baik dan akurat. Selanjutnya dengan dilakukannya survei lapangan dan wawancara dalam penelitian untuk mengetahui fakta dan informasi yang jelas terkait pola pemukiman suku Bajo dari segi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat.

Penelitian ini dimulai dari juni 2025 dengan di mulai dengan pengumpulan. Pengumpulan data berupa data sekunder seperti Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) dari Google Earth dan Citra SPOT 7 dari Space 8. Selain itu, peneliti melakukan survei lapangan untuk melakukan unjuk mengetahui kondisi lokasi penelitian dan melakukan wawancara ke bepepa masyarakat setempat untuk menanyakan kondisi sosial, ekonomi dan budaya di permukiman suku Bajo. Teknik analisis data dalam penelitian

meliputi pengolahan data spasial, digitasi penggunaan lahan, analisis pola permukiman, analisis perubahan permukiman dan overlay, interpretasi dan pelaporan hasil analisis identifikasi pola perubahan permukiman sisi Bajo.



Gambar 1. Peta lokasi penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

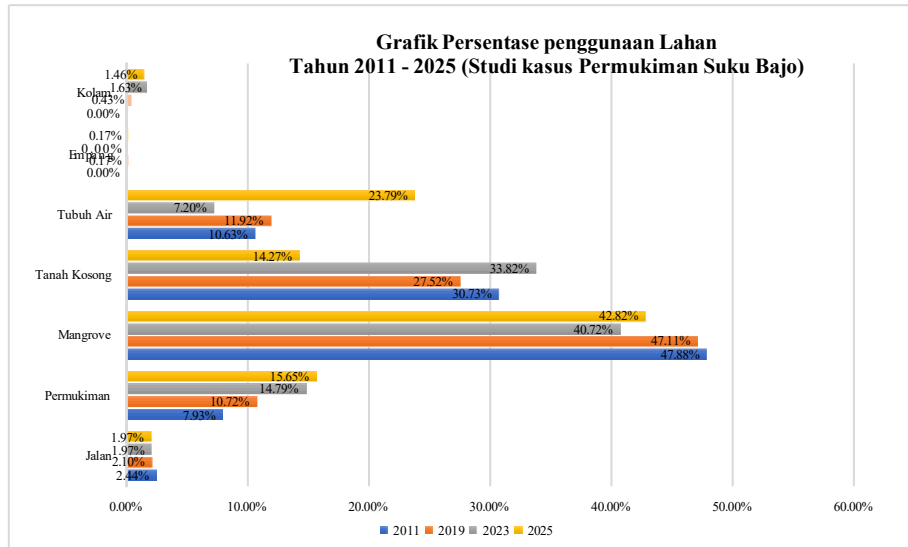
Perkembangan penduduk Suku Bajo di Desa Lemito menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Pertambahan jumlah penduduk ini juga berkaitan erat dengan pemukiman yang semakin meluas di wilayah pesisir. Secara terlihat bahwa memang penduduk Suku Bajo ini, mengalami perubahan yang jelas, dengan jumlah penduduk Suku Bajo tercatat ada berkeluarga (KK) 344 atau 1099 jiwa di tahun 2025. Perubahan ini juga dapat dilihat dari hasil overlay peta yang juga mengalami perubahan dari luasan permukiman sampai bagian bagian yang terlihat berubah juga yang berada di sekitar pemukiman Suku Bajo. Wilayah lemito pantai ini merupakan salah satu wilayah yang dihuni oleh komunitas suku Bajo yang dikenal sebagai masyarakat maritim. Hunian mereka umumnya berbentuk rumah panggung di atas perairan dangkal, dengan struktur kayu dan akses langsung ke laut. Pola permukiman mereka cenderung linear mengikuti garis pantai dan memiliki kerapatan yang tinggi

Keberadaan permukiman suku Bajo ini mengalami perubahan dari waktu ke waktu, baik dalam hal luas, sebaran, maupun posisi bangunan. Oleh karena itu, diperlukan analisis spasial untuk mengidentifikasi perubahan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, terutama antara tahun 2011, 2019, 2023 hingga tahun sekarang 2025 sehingga dapat dilihat perubahan yang terjadi

Tabel 1. Luasan penggunaan lahan dari tahun 2019 - 2025

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)			
		2011	2019	2023	2025
1	Jalan	0.57	0.49	0.46	0.46
2	Permukiman	1.85	2.5	3.45	3.65
3	Mangrove	11.17	10.99	9.5	9.99
4	Tanah Kosong	7.17	6.42	7.89	3.33
5	Tubuh Air	2.48	2.78	1.68	5.55
6	Empang	0	0.04	0	0.04
7	Kolam	0	0.1	0.38	0.34

Hasil Perhitungan Analisis 2025



Gambar 2. Grafik persentasi penggunaan lahan

Lahan permukiman menjadi kategori dengan pertumbuhan paling cepat di setiap tahun. Pada tahun 2011, luasnya hanya 1.85 Ha, yang setara dengan (7,93%) dari total wilayah. Luas ini terus meningkat menjadi 2.5 Ha (10,72%) pada tahun 2019, kemudian mencapai 3.45 Ha pada tahun 2023, yang setara dengan (14,79%). Proyeksi untuk tahun 2025 menunjukkan luasnya akan mencapai 3.65 Ha, yang setara dengan (15.65%). Peningkatan ini menunjukkan adanya perubahan yang cepat setiap tahun, dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah, serta pembangunan pemukiman yang ada setiap tahunnya.

Pembangunan jalan, dengan perluasan pemukiman. Pada tahun 2011, luasnya jalan hanya 0.57 Ha, atau (2,44%). Luasnya menjadi 0.49 Ha pada tahun 2019, dengan persentase (2,10%). Pada tahun 2023, luasnya stabil di 0.46 Ha, persentasenya menjadi (1,97%). Proyeksi untuk tahun 2025 menunjukkan luasnya diperkirakan tetap 0.46 Ha, dengan persentase mencapai (1,97%). Persentase yang terus meningkat menunjukkan kepadatan jaringan jalan yang bertambah, meskipun luasan totalnya tidak banyak berubah.

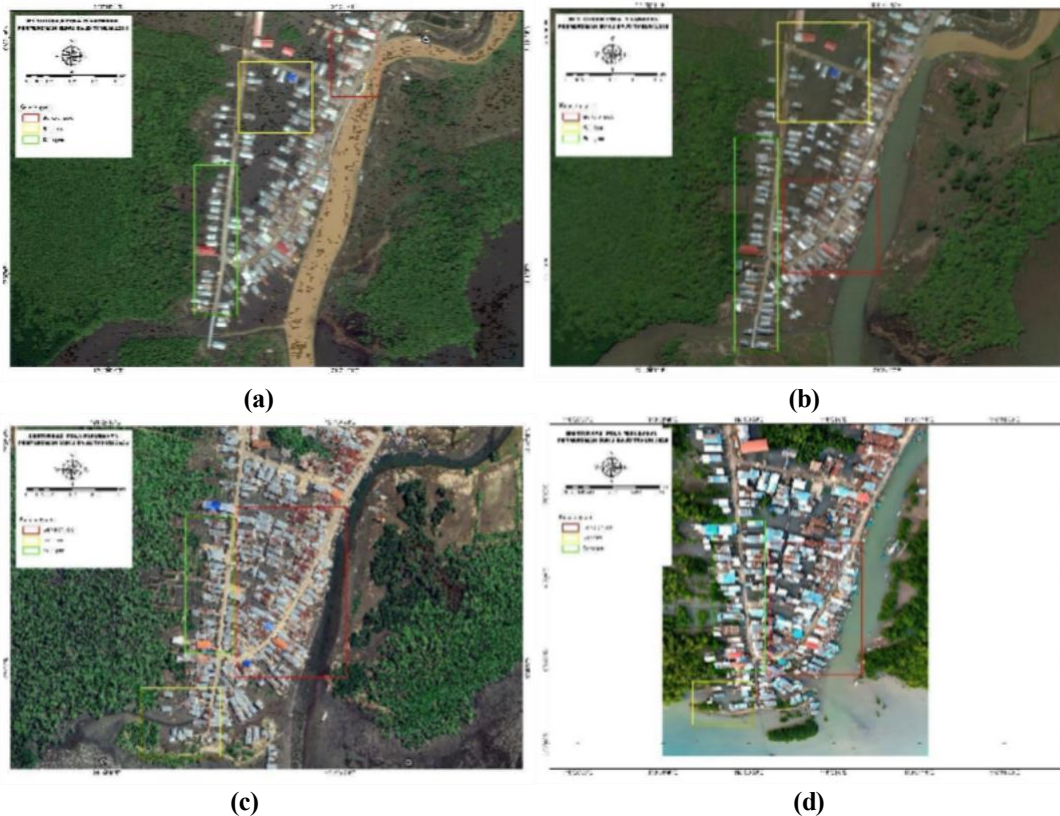
Lahan mangrove, pada tahun 2011, mangrove mendominasi wilayah dengan luas 11.17 Ha, atau (47,88%). Luasan ini terus menyusut menjadi 10,99 Ha pada 2019, dengan persentase (47,11%). Luasnya kembali turun menjadi 9,5 Ha pada 2023, atau (40,72%). Untuk tahun 2025 menunjukkan luasnya diprediksi 9,99 Ha, yang setara dengan (42,82%). Penurunan lahan ini dapat diidentifikasi adanya perubahan lahan mangrove secara besar-besaran untuk kebutuhan lain.

Tanah kosong, lahan ini mulai dimanfaatkan. Pada tahun 2011, luasnya 7.17 Ha, atau (30,73%). Luasnya berkurang menjadi 6.42 Ha pada 2019, dengan persentase (27,52%). Pada tahun 2023, luasnya meningkat menjadi 7.89 Ha, tetapi persentasenya turun menjadi (33,82%). Proyeksi untuk tahun 2025 menunjukkan luasnya diprediksi menurun menjadi 3.33 Ha, yang setara dengan (14,27%). Peningkatan sementara di tahun 2023.

Luasnya Tubuh Air dari 2.48 Ha (10,63%) di tahun 2011 menjadi 2.78 Ha (11,92%) di tahun 2019, dan terjadi penurunan luas di tahun 2023 menjadi 1.68 Ha (7,20%) pada tahun 2025, luasan dan persentasenya meningkat dengan luasan 5.55 Ha (23,79%), perubahan ini terjadi karena adanya faktor alami seperti perubahan iklim serta aktivitas manusia.

Empang memiliki luasan yang sangat kecil, menunjukkan tidak adanya perubahan signifikan, perubahannya hanya terlihat di tahun 2019 dengan luas 0,04 Ha (0,17%), hilang di tahun 2023 dan muncul kembali di tahun 2025 dengan luasan yang sama, ini disebabkan oleh adanya pemanfaatan lahan empang oleh warga sekitar.

Kolam mulai terlihat di tahun 2019 dengan luasan 0.1 Ha (0,43%), terjadi perubahan lebih luas 0.38 Ha (1,63%) di tahun 2023, dan di tahun 2025 ini terjadi pengurangan luas kolam 0,34 Ha (1,46%) perubahan kolam ini terjadi secara alami.



Gambar 4. Peta pola sebaran permukiman dan Peta Analisis jarak tetangga suku Bajo (a) tahun 2011, (b) tahun 2019, (c) tahun 2023 dan (d) tahun 2025

Pada gambar (a) di atas menunjukkan pola permukiman Suku Bajo pada tahun 2011. Peta ini mengidentifikasi tiga pola utama, yaitu berkelompok (merah) luas 0.53 Ha, Random (kuning) luas 0.82 Ha, dan seragam (hijau) luas 0.44 Ha. Pola-pola ini menunjukkan bagaimana permukiman masyarakat Suku Bajo tersebar di lokasi penelitian, dengan total luasan tahun 2011 di hitung keseluruhan 1.80 Ha. Kemudian pada Gambar (b) yaitu tahun 2019 Pola pemukiman suku bajo mulai luas persebarannya, bagian berkelompok (merah) luasnya 0.41 Ha ,Random (kuning) luasnya 0.79 Ha, dan seragam (hijau) luasnya 0.83 Ha. Dengan dihitung keseluruhan luas pada tahun 2019 luasnya 2.03 Ha mulai meningkat.

Selanjutnya pada gambar (c) yaitu tahun 2023 Pola pemukiman suku bajo mulai luas persebarannya banyak pemukiman pemukiman baru, bagian berkelompok (merah) luasnya 1.21 Ha ,Random (kuning) luasnya 0.68 Ha, dan seragam (hijau) luasnya 1.25 Ha. Dengan di hitunya keseluruhan luas pada tahun 2019 luasnya 3.13 Ha mulai meningkat. Dan pada gambar (d) tahun 2025 Pola pemukiman suku bajo mulai luas persebarannya, bagian berkelompok (merah) luasnya 1.29 Ha ,Random (kuning) luasnya 0.78 Ha, dan seragam (hijau) luasnya 1.32 Ha. Dengan dihitung keseluruhan luas pada tahun 2019 luasnya 3.40 Ha mulai meningkat.

Pada periode 2011–2019, tercatat lahan kosong seluas 4,64 hektar telah mengalami perubahan fungsi menjadi kawasan permukiman. Proses ini berlanjut pada periode 2019–2023, di mana terjadi konversi tambahan lahan kosong seluas 1,57 hektar menjadi area permukiman baru. Berdasarkan proyeksi spasial hingga tahun 2025, diperkirakan masih akan terjadi konversi lahan kosong seluas 3,11 hektar menjadi kawasan terbangun. Data tersebut mengindikasikan adanya tren peningkatan kebutuhan ruang hunian yang terus berlangsung seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi masyarakat Bajo di wilayah pesisir. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa proses pembangunan di wilayah pesisir Bajo tidak hanya berdampak pada perluasan area terbangun, tetapi juga terhadap degradasi ekosistem mangrove yang berperan penting sebagai pelindung alami pesisir. Pergeseran pola permukiman dari pola menyebar (random) menjadi berkelompok dan padat menandakan adanya proses modernisasi spasial, di mana masyarakat cenderung membangun rumah secara berdekatan di wilayah darat untuk memudahkan interaksi sosial, akses transportasi, serta aktivitas ekonomi.

Fenomena ini memperkuat teori yang dikemukakan oleh Fikrah dan Witjaksono (2022), bahwa perkembangan tata spasial masyarakat Suku Bajo mengikuti arah modernisasi dan pergeseran orientasi ruang hidup dari laut menuju darat. Dorongan untuk meningkatkan kualitas hidup, memperluas ruang aktivitas ekonomi, serta memperoleh akses yang lebih baik terhadap fasilitas umum menjadi faktor utama yang memicu perubahan pola pemukiman dan penggunaan lahan di wilayah ini. Berdasarkan hasil analisis spasial, perluasan permukiman di Desa Lemito diikuti oleh pergeseran pola persebaran permukiman. Menurut Aini et al. (2022), pola persebaran permukiman merupakan gambaran sifat penyebaran rumah atau unit hunian pada suatu wilayah, yang dapat dibedakan menjadi tiga tipe utama: berkelompok (*clustered*), menyebar (*random*), dan seragam (*uniform*).

Berdasarkan peta analisis sebaran permukiman Suku Bajo tahun 2011, pola yang tampak cenderung menyebar (*random*), yang merepresentasikan karakteristik tradisional masyarakat Bajo yang hidup berpindah dan tersebar di atas air. Namun, hasil analisis tahun 2025 menunjukkan perubahan dominan ke arah pola berkelompok (*clustered*). Pergeseran ini sejalan dengan hasil penelitian Fikrah et al. (2022) dan Pudjowibowo & Waani (2021) yang menyebutkan bahwa peningkatan kepadatan penduduk dan perubahan orientasi ruang dari laut ke darat menyebabkan pola pemukiman Suku Bajo menjadi lebih padat dan berkelompok di wilayah pesisir. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa sekitar 98% penduduk di wilayah Suku Bajo di Desa Lemito merupakan masyarakat asli Suku Bajo, sedangkan sisanya merupakan masyarakat Gorontalo yang menikah dengan warga Bajo. Ikatan kekerabatan masyarakat Bajo di Lemito masih sangat kuat, di mana hampir seluruh penduduk memiliki hubungan darah atau silsilah keluarga, meskipun berbeda garis keturunan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Baharuddin (2011), dan Irfannuddin, I., et al (2020), yang menunjukkan bahwa masyarakat Suku Bajo memiliki sistem sosial berbasis kekerabatan erat dan solidaritas komunitas tinggi. Hal ini menjadi ciri khas utama dalam struktur sosial Suku Bajo di berbagai wilayah pesisir Indonesia.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Fikrah dan Witjaksono (2022) yang menyatakan bahwa perkembangan tata spasial permukiman Suku Bajo cenderung mengikuti arah perkembangan zaman. Pergeseran pemukiman ke wilayah daratan terjadi karena pertimbangan kemudahan interaksi sosial, akses terhadap fasilitas umum, serta aktivitas ekonomi yang lebih dinamis. Modernisasi yang terus berlangsung setiap tahunnya turut menjadi faktor utama dalam mendorong perubahan pola permukiman masyarakat Bajo dari pola tradisional ke pola modern. Selain itu, pertumbuhan penduduk, kebutuhan ruang, dan dinamika sosial ekonomi juga berperan penting dalam mempercepat proses transformasi spasial tersebut.

Hasil survei lapangan menunjukkan bahwa 75% responden masih menetap di atas laut, sedangkan 25% responden sudah tinggal di daratan. Data ini mengindikasikan adanya perubahan bertahap dari pola hidup tradisional menuju bentuk permukiman yang lebih menetap di darat. Modernisasi juga tampak berpengaruh kuat terhadap perubahan pandangan masyarakat terhadap tempat tinggal. Berdasarkan hasil kuesioner, 87,5% responden menyatakan bahwa kondisi tempat tinggal mereka saat ini lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, sementara 12,5% responden menilai kondisinya masih kurang baik. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan persepsi positif terhadap kenyamanan, keamanan, dan kualitas hunian.

Hasil survei terhadap masyarakat Suku Bajo di Desa Lemito menunjukkan bahwa faktor lingkungan dan infrastruktur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan pola permukiman mereka. Berdasarkan hasil responden, sebanyak 62,5% masyarakat menyatakan bahwa kondisi sanitasi di rumah mereka tergolong baik, sedangkan 37,5% lainnya menilai masih kurang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek lingkungan menjadi salah satu faktor utama yang mendorong perubahan permukiman masyarakat Suku Bajo. Permasalahan lingkungan, terutama yang berkaitan dengan sanitasi dan pengelolaan limbah rumah tangga, sering kali menjadi alasan bagi masyarakat untuk memperbaiki atau memindahkan tempat tinggal mereka ke wilayah yang lebih layak dan bersih. Temuan ini sejalan dengan penelitian Pudjowibowo & Waani (2021) yang menyebutkan bahwa kualitas lingkungan permukiman memiliki peran besar dalam menentukan pola adaptasi dan perubahan bentuk permukiman masyarakat pesisir. Perubahan sosial ekonomi ini juga membawa dampak terhadap pola pekerjaan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa hanya 25% responden yang masih berprofesi sebagai nelayan aktif, sementara 75% lainnya telah beralih ke pekerjaan lain di darat. Pergeseran mata pencaharian ini menunjukkan bahwa modernisasi dan perubahan permukiman telah memengaruhi identitas budaya Suku Bajo yang sejak dahulu dikenal sebagai "orang laut". Meski

demikian, seluruh responden (100%) menyatakan bahwa jarak tempat tinggal dengan laut tidak menjadi penghambat bagi mereka untuk tetap melakukan aktivitas melaut. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterikatan budaya bahari masih melekat kuat meskipun terjadi perubahan gaya hidup. Hal ini sejalan dengan pendapat Wihasta dan Prakoso (2012) yang menyatakan bahwa karakteristik masyarakat tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial, ekonomi, dan budayanya, di mana perubahan dalam satu aspek akan berdampak langsung terhadap aspek lainnya. Hasil temuan ini memperkuat pandangan Yuliana & Arsyad (2023) bahwa perubahan pemukiman masyarakat pesisir, termasuk Suku Bajo, tidak hanya dipicu oleh faktor ekonomi dan kependudukan, tetapi juga oleh upaya masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup melalui akses terhadap lingkungan yang lebih sehat, infrastruktur yang lebih baik, serta fasilitas sosial yang memadai. Dengan demikian, perubahan pemukiman yang terjadi di Desa Lemito dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan hidup modern tanpa sepenuhnya meninggalkan identitas budaya bahari yang telah menjadi ciri khas masyarakat Suku Bajo.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis spasial dan kependudukan, luas permukiman mengalami peningkatan dari 1,85 Ha pada tahun 2011 menjadi 3,65 Ha pada tahun 2025, yang sebagian besar berasal dari konversi lahan mangrove dan tanah kosong. Peningkatan jumlah penduduk hingga mencapai 1.099 jiwa telah menjadi faktor utama yang mendorong perluasan wilayah hunian dan meningkatnya kepadatan permukiman di wilayah pesisir. Kemudian dari sosial dan ekonomi, hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan pola mata pencaharian masyarakat. Sebanyak 75% responden telah beralih dari pekerjaan sebagai pelaut ke sektor daratan seperti perdagangan, buruh, dan jasa. Pergeseran ini merupakan bentuk adaptasi terhadap modernisasi serta tuntutan ekonomi yang berkembang di wilayah pesisir. Meskipun demikian, 100% responden menyatakan bahwa jarak antara tempat tinggal dan laut tidak mempengaruhi aktivitas melaut, yang menandakan bahwa nilai-nilai budaya bahari masih tertanam kuat dalam kehidupan Masyarakat. Salin itu, dari budaya dan sosial masyarakat, sebanyak 62,5% responden merasa bahwa budaya Suku Bajo mulai mengalami kemunduran, dan 75% menyatakan bahwa generasi muda tidak lagi diajarkan tradisi leluhur. Hal ini menunjukkan adanya ancaman terhadap keberlanjutan identitas budaya akibat modernisasi. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan sisi positif di mana 87,5% responden menilai bahwa kehidupan sosial di lingkungan baru lebih baik, dengan meningkatnya interaksi dan solidaritas antar warga

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, A. N., Putri, R. A., & Istanabi, T. (2022). Kajian Pola Persebaran Permukiman Di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. *Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman*, 4(2), 241-257.
- Baharudin. (2011). Baharudin. (2011). Transformasi Sosial dan Budaya Suku Bajo di Pesisir Sulawesi Tenggara. Kendari: Universitas Halu Oleo. *Transformasi Sosial Dan Budaya Suku Bajo Di Pesisir Sulawesi Tenggara. Kendari: Universitas Halu Oleo.*
- Damisi, D. M., Kumurur, V. A., & Sela, R. L. (2014). Analisis faktor-faktor kekumuhan kawasan permukiman pesisir tradisional (studi kasus: Desa Bajo Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo). *Sabua: Jurnal Lingkungan Binaan dan Arsitektur*, 6(1), 163-172.
- Fikrah, M., Witjaksono, A., Sasongko, I., & Imaduddina, A. H. (2022). Identifikasi Perubahan Pola Permukiman Suku Bajo Di Desa Jaya Bakti Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah. *Ruang: Jurnal Arsitektur*, 16(21 Oktober), 67-77.
- Fikrah, M., Witjaksono, A., Sasongko, I., & Imaduddina, A. H. (2022). Identifikasi Perubahan Pola Permukiman Suku Bajo Di Desa Jaya Bakti Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah. *Ruang: Jurnal Arsitektur*, 16(1 Maret), 67-77.
- Irfannuddin, I., Siagian, M., Jusman, S., Purba, J., Ilyas, E., & Ibrahim, N. (2020). Hurdle aerobic

- exercise increases angiogenesis and neuroplasticity in the hippocampus and improves the spatial memory ability of middle-aged mice. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 8(A), 395-402.
- Mukramin, S. U., Haniah, S., Nawir, M., Ismail, L., & Fatmawati, F. (2023). Pengentasan Kemiskinan Etnis Bajo Melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 13(2), 141-153.
- Obie, M. (2016). Perubahan sosial pada komunitas Suku Bajo di pesisir Teluk Tomini. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 16(1), 153-174.
- Poedjowibowo, D., & Waani, J. O. (2016). *Teritorialitas Pada Permukiman Suku Bajo Di Desa Tumbak (Studi Kasus Permukiman Diatas Air)* (Doctoral dissertation, Sam Ratulangi University).
- Rakhmawati, E. R., Sriyono, S., & Setyowati, D. L. (2014). Analisis Pola Sebaran Permukiman Berdasarkan Topografi di Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. *Geo-Image Journal*, 3(2).
- Salipu, M. A., Mulyati, A., Nurmaningtyas, A. R., & Santoso, I. (2022). Kajian Perubahan Permukiman Suku Bajo Berdasarkan Konsep Transformasi Kebudayaan Ignas Kleden. *Mintakat: Jurnal Arsitektur*, 23(2), 1-14.
- Wihasta, C. R., & Prakoso, H. B. S. (2012). Perkembangan Desa Wisata Kembang Arum dan Dampaknya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Donokerto Kecamatan Turi. *Jurnal Bumi Indonesia*, 1(1).
- Wihasta, C. R., & Prakoso, H. B. S. (2012). Perkembangan Desa Wisata Kembang Arum dan Dampaknya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Donokerto Kecamatan Turi. *Jurnal Bumi Indonesia*, 1(1).
- Wihasta, C. R., & Prakoso, H. B. S. (2012). Perkembangan Desa Wisata Kembang Arum dan Dampaknya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Donokerto Kecamatan Turi. *Jurnal Bumi Indonesia*, 1(1).
- Yusuf, L., & Rahim, A. (2020). "Kepastian Hukum Terhadap Hak Bermukim Suku Bajo di Atas Laut: Studi Kasus Desa Torosiaje Laut, Kabupaten Pohuwato." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Daerah*, Vol. 8 No. 2, Universitas Negeri Gorontalo.